

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga dalam proses memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap pajak daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : *Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi dan Pajak Daerah*

ABSTRACT

National development aims to create a just and prosperous society through the improvement of standard of living, intelligence and prosperity of all people. In the implementation of national development is not separated by the existence of regional development. So in the process of expediting the national development required the budget of the state government obtained from the collection of local taxes. For this reason the government continues to explore every potential that can be used to improve and optimize local revenue. The purpose of this study to analyze the population, GRDP and inflation of local taxes. This research uses multiple regression analysis. Result of research Number of population have positive and significant effect to local tax revenue. PDRB has a positive effect on local tax revenue. Inflation has a positive and significant impact on local tax revenues.

Keywords: *Total Population, GRDP, Inflation and Local Taxes*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi awal yang mengalami Pemekaran. Pada awalnya Provinsi Sulawesi Utara terbentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 1964 dengan Manado sebagai ibukotanya. Hingga awal tahun 2000, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari lima kabupaten dan tiga kotamadya. Pada tahun 2000, Provinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo berdasarkan UU Nomor 38 tahun 2000 dengan ibukota masing-masing adalah Kota Manado dan Kota Gorontalo. Sejak itu, beberapa kabupaten di Sulawesi Utara mengalami pemekaran. Pada tahun 2010, Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat kota yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kotamobagu, sebelas Kabupaten yaitu Minahasa, Minahasa Utara, Talaud, Sitaro, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Sangihe, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Timur.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi termaju di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai sebuah provinsi perbatasan, Sulawesi Utara memiliki lokasi yang strategis sebagai penghubung ke Asia Timur dan kawasan Maluku serta Papua. Provinsi ini dikaruniai sumber daya alam, khususnya kekayaan alam laut. Jumlah penduduknya sebesar 2,2 juta jiwa tersebar di kawasan pulau Sulawesi dan kawasan kepulauan diutara pulau Sulawesi. Dari segi sumber daya manusia, kondisinya relatif lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.

Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan selalu meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2012 hingga 2016 adalah pemasukan dari Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah untuk provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sebesar Rp 633.352.183.500 kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 785.467.967.366 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 938.583.020.354 pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.1.012.945.961.386 dan terakhir di tahun 2016 turun menjadi Rp.981.044.550.486.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Karena itu perolehan pajak daerah diarahkan dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang

secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Disamping kebijakan yang telah di tetapkan Pemerintah Sulawesi Utara juga telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2018. Yaitu peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah (RKPD Sulawesi Utara 2018).

Penerimaan pajak daerah juga tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor-faktor ini selalu berfluktuatif setiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai proyeksi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave (1989) besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun. Menurut Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sebesar 2.319.916 jiwa meningkat pada tahun 2013 menjadi 2.343.527 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 2.386.604 jiwa pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.412.118 jiwa dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.436.921 jiwa (*Sumber BPS Sulut*). Ketika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan akan barang publik akan semakin banyak sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan untuk memberikan barang-barang publik tersebut tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pemungutan pajak yang bersifat memaksa.

Wantara (1997) mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah tidaklah mampu menyediakan output yang dibutuhkan secara cepat, dalam keadaan demikian kenaikan tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga, karena diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase tingkat harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Disini pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak, sehingga permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintan). Begitu pula dengan kenaikan biaya secara tiba-tiba jika didukung oleh perluasan pemerintah, maka akan mendorong kenaikan harga, selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah yang diperlukan untuk mengimbangi biaya (inflasi akibat penawaran).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009).
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus digunakan untuk "*public saving*" dan *public saving* ini yang akan digunakan untuk membiayai "*public investment*".

Dari ke-4 (empat) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 (dua) merupakan ciri yang paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan atau Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku istilah *no taxation without representation* yang artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.

Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di

Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang.

Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih dapat kewenangan untuk melakukan berbagai pungutan lain, antara lain:

1. Retribusi, retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Sumbangan atau iuran yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada sekelompok atau golongan pembayarannya atau golongan tertentu, misalnya SWP3D (Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Daerah).
3. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, misalnya cukai terhadap tembakau, cukai gula, cukai bensin, cukai minuman keras.
4. Bea Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun cara lainnya (menggunakan mesin teraan atau pemeteraian kemudian).

Penduduk

Penduduk dapat diartikan sebagai seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk biasanya diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik, 2013).

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, mata pencarian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokan yang paling sering digunakan adalah pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Mantra (2003) Menjelaskan mengenai komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk Piramida penduduk, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut usia dan jenis kelamin. Penggambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari nol lalu naik. Kenaikan ini dapat tahunan, dapat pula dengan jenjang lima tahunan.

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.

Menurut Winardi (1995) pengertian inflasi adalah suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang (Sarwoko, 2005).

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut secara bersamaan secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan sifatnya Nanga (2001) membagi inflasi ke dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Inflasi Sedang (*Moderate Inflation*)
Kondisi ini ditandai dengan kenaikan laju inflasi yang lambat dan waktu yang relatif lama.
2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)
Kondisi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan yang lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.
3. Inflasi Tinggi (*hyper inflation*)
Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi punya keinginan untuk menyimpan uang kerana nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga – harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yang dijabarkan sebagai berikut (Sukirno, 1994).

- 1) *Demand-Pull Inflation*
Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang – barang (*agregate demand*) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
- 2) *Cost Push Inflation*
Inflasi jenis *Cost – Push inflation* terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga – harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supplyshocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan – perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini.

Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai barang.

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), (Nopirin, 1994).

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh adanya shock dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sadono Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut salah satu sumber di BPS (2007), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Menurut Todaro, (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Seperti telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut:

- a) Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- b) Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di

dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan.

Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan jenis data yang digunakan adalah *Time series*. Data *Time Series* dari tahun 2005 sampai tahun 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data dana realisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016
2. Data perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016
3. Data Inflasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016
4. Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, dengan periode waktu penelitian Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data sebagai berikut :

1. Data primer : Pengumpulan data meliputi buku-buku, internet, perpustakaan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.
2. Data sekunder : Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang di terbitkan oleh Instansi/lembaga/organisasi profesi dan lain-lain.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pajak Daerah (Y) Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak memberikan imbalan

- langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah. Satuan dari penerimaan Pajak Daerah adalah Rupiah (Rp)
- Jumlah Penduduk (X_1) adalah jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara yang di hitung dalam satuan hitung ribu jiwa
 - PDRB (X_2) nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode kuartalan yang dinyatakan dalam Rupiah
 - Inflasi (X_3) Inflasi adalah perubahan presentase dari IHK.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variable tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variable tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variable bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Pajak Daerah
X_1	= Jumlah Penduduk
X_2	= PDRB
X_3	= Inflasi
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

HASIL DAN PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005- 2016. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). Dalam uji multikolinieritas dengan menggunakan metode VIF. Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	VIF
X1	3.11E-11	1.344265
X2	3.72E-17	3.515360
X3	4.42E-08	3.012595

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari perhitungan VIF di atas, nilai yang di dapat lebih lebih besar dari 10 sehingga terdapat masalah multikolinieritas. Walaupun dalam uji multikolinieritas tidak lolos ujimultikolinieritas. Akan tetapi, karna persamaan ini tidak untuk diprediksi sehingga masalah multikolinieritas bisa di abaikan (Gujarati, 2002).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *White test*. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode *white test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.067246$
Chi-square hitung Obs* R-squared = 0.806953
Chi-squares pada α 5 % = 7.81472

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 2 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.067246 Nilai Chi-squares hitung sebesar 0.806953 yang diperoleh dari informasi Obs* R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df

sebesar 3 adalah 7.81473. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi menggunakan metode *LM test*. Hasil uji autokorelasi dengan metode *LM test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.005972$
Chi-square hitung $Obs^*R\text{-squared} = 0.071660$
Chi-squares pada $\alpha = 5\% = 5.99$

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 3 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.005972 Nilai Chi-squares hitung sebesar 0.071660 yang diperoleh dari informasi $Obs^*R\text{-squared}$ (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 2 adalah 5.99. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) terhadap Pajak Daerah (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 4 berikut:

$$\text{LogY} = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$

$$\text{LogY} = 219793.2x_1 + 3.559902x_2 + 9.94E+09x_3$$

**Tabel 4
Hasil Regresi**

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
C	-4.72E+12	-2.265406	0.0533
X1	2197932*	2.223500	0.0569
X2	3.559902	1.030599	0.3329
X3	9.94E+09**	2.783329	0.0238
$R^2 = 0.982428$		F-statistik = 149.0917	

*Keterangan ***) signifikan pada $\alpha = 1\%$*

***) signifikan pada $\alpha = 5\%$*

**) signifikan pada $\alpha = 10\%$*

Hasil Olah Eviews 8.0

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Jumlah penduduk (X1) pada tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk (X1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0569. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 10%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel jumlah penduduk (X1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.223500 dan t_{tabel} 1.38303 dengan df 9 (n-k). Jadi, $t_{hitung} 2.223500 > t_{tabel} 1.38303$ Artinya ada hubungan linier antara jumlah penduduk dengan pajak daerah (Y). Jadi, dapat disimpulkan jumlah penduduk memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pajak daerah.

Hasil persamaan regresi PDRB (X2) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X2) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.3329. Nilai probabilitas ini lebih besar dari α 10%, maka H_a ditolak H_0 di terima. Variable PDRB (X2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.030599 dan t_{table} 1.38303 dengan df 9 (n-k). Jadi, $t_{hitung} 1.030599 < t_{tabel} 1.38303$. Artinya tidak ada hubungan linier antara PDRB (X2) dengan pajak daerah.

Hasil persamaan regresi inflasi (X3) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel inflasi (X3) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0238. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 5%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel inflasi (X3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.783329 dan t_{tabel} 1.83311 dengan df 9 (n-k). Jadi, $t_{hitung} 2.783329 > t_{tabel} 1.83311$ Artinya ada pengaruh inflasi terhadap pajak daerah (Y). Jadi, dapat disimpulkan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.4 dapat dijelaskan pengaruh variabel Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Daerah (Y). Nilai F-statistik yang diperoleh 149.0917 sedangkan F-tabel 4.74. Nilai F table berdasarkan besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1) = 2$ dan df untuk denominator $(n-k/12-3) = 9$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2) dan Inflasi (X3) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Daerah (Y).

Uji Determinasi R^2

Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.982428. artinya, variasi perubahan jumlah penduduk, PDRB dan inflasi mempengaruhi pajak daerah sebesar 98.24%, sedangkan sisanya (1.76%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

1. Jumlah penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya, apabila jumlah penduduk bertambah atau mengalami kenaikan akan menambah membuat penerimaan pajak daerah meningkat pula begitu sebaliknya *ceteris paribus*. Teori Hansen mengenai stagnasi (*seculer stagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang

tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

Hasil Helti (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah sektoral di Kabupaten Karanganyar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arianto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Artha 2016 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember

Hasil penelitian Hariyuda (2009) menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif dengan penerimaan pajak daerah. karena syarat untuk memungut pajak diantaranya adalah harus adanya subjek pajak. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari pajak daerah. Dan juga semakin banyak pemerintah harus mengeluarkan barang-barang publik karena semakin banyak permintaan akan barang publik akibat peningkatan jumlah penduduk. Sebagai subjek pajak, maka penduduk akan mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk membayar pungutan pajak dan akan semakin banyak pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini akan membuat pemerintah melakukan pengoptimalan akan penerimaan pajak daerah dengan meningkatkan tarif pajak yang berlaku.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pajak daerah artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah meningkat *ceteris paribus*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha 2016 yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Koefisien dari variabel PDRB bertanda (+) yang berarti bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap pajak daerah. Ketika terjadi penambahan PDRB maka semakin besar potensi pajak daerah tersebut. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) antara lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian Helti (2010) menunjukkan PDRB berpengaruh positif terhadap pajak daerah sektoral di Kabupaten Karanganyar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) yang menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berarti bahwa PDRB yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah berperan dalam penerimaan pajak daerah. Sektor-sektor pembentuk PDRB juga telah dikenakan pajak yang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2010) yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. dan bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah artinya apabila inflasi meningkat penerimaan pajak daerah juga akan meningkat begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Menurut teori inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniz (2013) Hasil deteksi t dari penelitiannya diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. faktor masalah sosial yang muncul dari inflasi yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. BPS (2000) mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) mengatakan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 diterima. Prawironegoro (2011) mengatakan bahwa Ketika harga barang naik atau turun secara terus menerus, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan yang artinya ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa, meskipun pendapatan mereka berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa sehingga ketika inflasi ini naik atau turun tidak berakibat pada penerimaan pajak daerah kota Surabaya.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha (2016) yang mengatakan bahwa berdasarkan Uji t hipotesis dan koefisien pada variabel inflasi diketahui bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyuda (2009) menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif dengan penerimaan pajak daerah. karena syarat untuk memungut pajak diantaranya adalah harus adanya subjek pajak. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari pajak daerah
2. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan akan diikuti juga dengan kenaikan penerimaan pajak daerah. Ketika terjadi penambahan PDRB maka dapat disimpulkan semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi pajak daerah tersebut. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
3. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. Yang artinya apabila inflasi naik akan menyebabkan penerimaan pajak daerah juga naik.

Saran

Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hendaknya lebih mengoptimalkan lagi pos-pos penerimaan pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal untuk pengembangan komoditas unggulan. Berkembangnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2000.** *Pajak Indonesia. Diadit Media*, Yogyakarta.
- Hariyuda, R. 2009.** *Analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak Daerah (studi kasus di kota kediri)*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang
- Mardiasmo, 2008,** *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nanga, Muana, 2001.** *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press.
- Nopirin. 2000.** *Ekonomi Moneter. Buku I. Edisi ke empat*. Cetakan Ke tujuh. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Sadono Sukirno. 1994.** Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Raja Grafindo
- Sukirno, Sadono. 2002.** Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004.** Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwoko. 2005.** *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset.

Thomas Sumarsan, 2009. Perpajakan Indonesia. Esia Media. Jakarta

Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga

Wantara, Agus, 1997. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY (1970 –1992)*, Kinerja –Jurnal Bisnis dan Ekonomi No. 2/Januari, 1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.

